

Pengendalian rutin yang dilakukan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sampai dengan Semester II Tahun 2025

No	Kelompok/Uraian Risiko	Komentar/Catatan
A. Organisasi		
1.	Tujuan organisasi belum ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu	Tujuan organisasi SUDAH ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu. Sudah ada dokumen (Renstra, PK, LKJ)
2.	Pegawai tidak mengetahui dan memahami tujuan organisasi	Pegawai SUDAH mengetahui dan memahami tujuan organisasi (uraian tugas)
3.	Satuan kerja belum sepenuhnya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang formal untuk keseluruhan prosedur dan keseluruhan kegiatan	Satuan kerja SUDAH sepenuhnya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang formal untuk keseluruhan prosedur dan keseluruhan kegiatan.
4.	SOP yang ada tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	SOP yang ada BELUM SEPENUHNYA berjalan secara optimal karena SOP belum disosialisasikan.
5.	SOP ada tetapi belum berbasis risiko	SOP SUDAH berbasis risiko.
6.	Ada pemisahan tugas dan fungsi tetapi tidak berjalan secara optimal atau terjadi tumpang tindih	Ada pemisahan tugas dan fungsi tetapi masih perlu penyempurnaan.
B. Perencanaan		
1.	Perencanaan/penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) belum melibatkan pihak yang berkompeten (aspek t eknis pekerjaan/kinerja dan aspek keuangan)	Perencanaan/penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) SUDAH melibatkan pegawai yang berkompeten secara berjenjang.
2.	Perencanaan barang/aset melebihi dari kebutuhan yang seharusnya dan belum didasarkan pada asas kebutuhan	Perencanaan barang/ aset SESUAI dari kebutuhan yang seharusnya dan SUDAH didasarkan pada asas kebutuhan (TOR RAB)
.	Perencanaan barang/aset belum mempertimbangkan risiko pada tahap pemanfaatan	Perencanaan barang/ aset BELUM SEPENUHNYA mempertimbangkan risiko pada tahap pemanfaatan (terbatas anggaran dan kompetensi SDM yang ada)
4.	Perencanaan belum mempertimbangkan kapasitas satuan kerja (kuantitas dan kompetensi SDM)	Perencanaan SUDAH mempertimbangkan kapasitas satuan kerja (SESUAI TOR RAB)
5.	Perencanaan belum mempertimbangkan risiko dan belum menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktifitas/kegiatan untuk kegiatan yang seharusnya memerlukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko	Perencanaan SUDAH mempertimbangkan risiko dan SUDAH menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktifitas/kegiatan untuk kegiatan yang seharusnya memerlukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko
6.	Kurangnya keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan kinerja dan anggaran	Perencanaan kinerja anggaran SUDAH terpadu, konsisten, dan sinkron (REVISI RKAKL)
7.	Terdapat kesalahan dalam perlakuan dan pengakuan keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	MASIH terdapat kesalahan dalam perlakuan dan pengakuan keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
C. Pelaksanaan Anggaran		
1.	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid/tidak sesuai ketentuan)	Pertanggungjawaban akuntabel (bukti lengkap sesuai ketentuan) (VERIIKATOR SATKER)
2.	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	Pekerjaan dilaksanakan TIDAK mendahului kontrak atau penetapan anggaran.

3.	Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	Proses pengadaan barang/ jasa SESUAI ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara) (DOKUMEN KONTRAK)
4.	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	TIDAK TERDAPAT pemecahan kontrak untuk menghindar lelang.
5.	Pelaksanaan lelang secara proforma	Pelaksanaanlelang SESUAI proforma.
6.	Penyetoran penerimaan negara/daerah atau kas di bendaharawan ke Kas negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	Penyetoran penerimaan negara/ daerah atau kas di bendaharawan ke kas negara/ daerah TIDAK melebihi batas waktu yang ditentukan.
7.	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	Pertanggungjawaban/ penyetoran uang persediaan TIDAK melebihi batas waktu yang ditentukan.
8.	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum/tidak disetor ke kas negara/daerah	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran SUDAH disetor ke kas Negara (Tahun 2023)
9.	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	Kepemilikan aset BELUM SEPENUHNYA didukung bukti yang sah (khususnya aset-aset lama di luar DIPA Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok).
10.	Pengalihan/revisi anggaran tidak sesuai ketentuan	Pengalihan/ revis ianggaran SUDAH sesuai ketentuan.
11.	Kesalahan pembebanan anggaran dan pelampauan terhadap pagu anggaran	TIDAK TERDAPAT kesalahan pembebanan anggaran dan pelampauan terhadap pagu anggaran.
12.	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	Pelaksanaan belanja SESUAI mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
13.	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran	SUDAH ada pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran.
14.	Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran tidak/kurang memadai	Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran SUDAH SESUAI.
15.	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	Penggunaan anggaran SUDAH tepat sasaran/ tidak sesuai peruntukan.
D.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
1.	Penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas negara	Penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan SUDAH ditetapkan dipungut/ diterima/ disetor ke kas negara
2.	Penggunaan langsung terhadap penerimaan negara	Penggunaan langsung terhadap penerimaan negara SESUAI dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.02/2007 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (Di Luar Sumber Daya Alam Perikanan) Di Lingkungan Departemen Kelautan Dan Perikanan
3.	Penerimaan negara diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	Penerimaan negara TIDAK diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak
4.	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	Pengenaan tariff pajak/ PNBP TIDAK lebih rendah dari ketentuan
5	Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan, serta penggunaan Penerimaan negara tidak sesuai ketentuan	Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan, serta penggunaan Penerimaan negara sudah SESUAI ketentuan
E.	Akuntansi dan Pelaporan	
1.	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	Pencatatan SUDAH akurat (CHR ITJEN KP)

2.	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	Proses penyusunan laporan SUDAH sesuai ketentuan.
3.	Entitas terlambat menyampaikan laporan	Entitas SESUAI JADWAL menyampaikan laporan (BA REKON)
4.	Pelaporan tidak/belum mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku	Pelaporan TELAH mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku.
5.	Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	Pelaporan SUDAH didukung SDM yang memadai (MENGIKUTI PELATIHAN, WORKSHOP, DLL)
6.	Perhitungan penyusutan tidak sesuai ketentuan	Perhitungan penyusutan SUDAH sesuai ketentuan.
7.	Pengelolaan BMN termasuk persediaan belum dilakukan secara memadai	Pengelolaan BMN termasuk persediaan SUDAH dilakukan secara memadai (OPNAME BULANAN)
F.	Kerugian Negara	
1.	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	TIDAK TERDAPAT belanja atau pengadaan barang/ jasa yang fiktif
2.	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	Rekanan pengadaan barang/ jasa TIDAK ADA yang tidak menyelesaikan pekerjaan
3.	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	TIDAK TERDAPAT kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang
4.	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	TIDAK ADA kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang.
5.	Pemahalan harga (<i>Mark up</i>)	TIDAK ADA pemahalan harga (<i>Mark up</i>)
6.	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	TIDAK ADA penggunaan uang/ barang untuk kepentingan pribadi.
7.	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	TIDAK ADA pembayaran honorarium dan/ atau biaya perjalanan dinas ganda dan/ atau melebihi standar yang ditetapkan (SBM)
8.	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	Spesifikasi barang/ jasa yang diterima SESUAI dengan kontrak (PEJABAT/ PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN)
9.	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	Belanja SESUAI dan TIDAK melebihi ketentuan.
10.	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan Negara	Penjualan/ pertukaran/ penghapusan aset negara SESUAI ketentuan dan TIDAK merugikan Negara.
11.	Penyetoran penerimaan negara dengan bukti fiktif	TIDAK TERDAPAT penyetoran penerimaan negara dengan bukt i fiktif.
12.	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	TIDAK ADA kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/ jasa tetapi pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya.
13.	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	Rekanan melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan.
14.	Aset dikuasai pihak lain	TIDAK ADA aset yang dikuasai pihak lain
15.	Pembelian aset yang berstatus sengketa	TIDAK ADA pembelian aset yang berstatus sengketa.
16.	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada Negara	TIDAK ADA pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan ase t kepada Negara.
17.	Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai	TIDAK ADA pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai.
G.	Kepegawaian	
1.	Pegawai yang ada belum seluruhnya menaati jam kerja	Pegawai yang SUDAH seluruhnya menaati jam kerja
2.	Dalam menjalankan tugas dan fungsi, terdapat pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya	Dalam menjalankan tugas dan fungsi, MASIH terdapat pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya (DALAM PROSES PENAAATAN)

3.	Instansi belum mempunyai rencana pengembangan pegawai	Instansi SUDAH mempunyai rencana pengembangan pegawai (IB, TB, DIKLAT, DLL)
4.	Terdapat pegawai yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan tetapi belum dijatuhi hukuman disiplin	TIDAK terdapat pegawai yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan tetapi belum dijatuhi hukuman disiplin.
5.	Terdapat pegawai yang belum menjalankan tugas dan fungsinya	TIDAK terdapat pegawai yang belum menjalankan tugas dan fungsinya
H.	Kinerja	
1.	Terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi instansi	Kegiatan BELUM sesuai dengan tugas dan fungsi instansi (PERMEN KP No. PER.28/MEN/2010). Penambahan tugas fungsi sesuai perkembangan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan uji mutu obat ikan, pengujian residu) belum termasuk ke dalam Tusi lama (berupa penugasan saja) dan akan disesuaikan dengan tusi perubahan Loka menjadi Balai.
2.	Terdapat kegiatan belum dilaksanakan dan melewati batas waktu yang telah ditetapkan	Kegiatan SUDAH dilaksanakan SESUAI batas waktu yang telah ditetapkan (ROK, Dokumen Kontrak)
3.	Terdapat kegiatan sudah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan	Kegiatan sudah dilaksanakan dan SESUAI dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan (ROK, Dokumen Kontrak)
4.	Terdapat kegiatan yang tidak dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan	Kegiatan mencapai target kinerja yang ditetapkan (LAKIP, LTHT, LAPTAH)
5.	Terdapat kegiatan, dalam pelaksanaannya menyimpang sehingga kemungkinan mengakibatkan tujuan tidak dapat dicapai	TIDAK terdapat kegiatan, dalam pelaksanaannya menyimpang sehingga kemungkinan mengakibatkan tujuan tidak dapat dicapai.